



**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh

SHAELENDRA PRABU YUDA,SH

NIM. B4B 006 226

Pembimbing

H. BUDI ISPRIYARSO, S.H., M. Hum.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh

**SHAELENDRA PRABU YUDA, S.H.
NIM. B4B 006 226**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 19 April 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui

Pembimbing

**Ketua Program
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**H. BUDI ISPRIYARSO, S.H., M. Hum
NIP : 131 682 450**

**H. MULYADI, S.H., M.S
NIP : 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Penulis

(SHAELENDRA PRABU YUDA, SH)

MOTTO:

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (Ad Duha: 7, 8 & 11)

Persembahan Untuk :

- *Ayahanda Hamirul Han dan Ibunda Elva Farida Tercinta*
- *Kakak dan Adik-Adik, Sari, Erry, Lassa dan Ima*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karunia kepada penulis sehingga yang telah mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK”**

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan hingga penulisan tesis ini selesai.
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali.
5. Bapak Dwi Purnomo, S.H., M.Hum. dan Bapak Suparno, S.H., M.Hum. selaku tim penguji.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staff pengajaran Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak Kususmasto Subagjo, S.E, M.Si. selaku Majelis IV Hakim Pengadilan Pajak.
9. Ayahanda Drs. Hamirul Han, M.Si. dan Ibunda Elva Farida Beserta kakak dan adik-adikku yang tercinta Sartika Sari, S.H., M.Kn, Erry Fachrullah, Shaelva Lassa dan Imartha.
10. Keluarga Besar Nenenda H.M. Sai Sohar dan Nenenda M. Han (Alm).
11. Ria Agustar, S.H., M.Kn. yang sudah setia dan selalu sabar menghadapi Penulis dalam keadaan apapun.
12. Bu Sartini, Mas Pongki, Mbak Henny, Bu Anugrah, Uda Edral, Gayuh dan semua teman-teman Angkatan 2006 Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala bantuannya dalam penulisan ini.
13. Semua pihak yang terlibat bersama penulis pada waktu mengikuti pendidikan sampai selesainya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2008

Shaelendra Prabu Yuda, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	Viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Pajak dan Sengketa Pajak.....	19
1. Pengertian Pajak	20
2. Pengertian Sengketa Pajak.....	28

B. Pengadilan Pajak.....	29
1. Kompetensi	29
2. Objek Sengketa Pajak	31
3. Subjek Sengketa Pajak	33
4. Organisasi Pengadilan Pajak	34
5. Majelis Kehormatan Hakim.....	35
6. Susunan atau Tingkatan Pengadilan	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Populasi dan Sampel	41
F. Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak.....	44
B. Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.....	68

C. Upaya untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak	71
--	----

BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan.....	73
E. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset / Penelitian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Sekretariat Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
3. Skema Proses Gugatan dengan Acara Biasa
4. Skema Proses Gugatan dengan Acara Cepat
5. Skema Proses Banding dengan Acara Biasa
6. Skema Proses Banding dengan Acara Cepat
7. Data Banding dan Gugatan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2007
8. Data Permohonan Peninjauan Kembali sampai dengan Tahun 2007
(Per 31 Desember 2007)

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK”** berlatar belakang masalah pungutan pajak oleh fiskus (aparatur pajak), dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Secara historis, penyelesaian sengketa pajak pada awalnya menjadi wewenang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Namun lembaga ini dianggap kurang memadai untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dibentuklah suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Tujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak, kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan diadakan proses analisis data secara *deskriptif-analitif-kuantitatif* sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini, di samping sebagai pengganti BPSP, secara substansial merupakan penyempurnaan dari BPSP. Kendala yang timbul didalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala dibidang administratif dan yudisial. Proses usulan revisi mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan usaha untuk mengatasi kendala yang timbul disamping peningkatan Sumber Daya Manusia terutama dibidang pendidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan di Pengadilan Pajak. Karena penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana diharapkan kinerja Pengadilan Pajak lebih ditingkatkan dengan menyempurnakan tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa pajak.

Kata kunci : Penyelesaian, Sengketa, Pajak, Pengadilan.

ABSTRACT

This thesis gets title “**TAXES DISPUTE WORKING OUT BASED NUMBER LAW 14 YEARS 2002 ABOUT TAXES JUSTICE AT TAXES JUSTICE**” drops back imposition problem by fiscus (taxes aparatur), in its performing don't sparse evoke taxes dispute among assessable with fiscus. Based histories, taxes dispute working out in the beginning as judgement Ceremony Authority Taxes (MPP). But this institute reputed less is equal to for gets to solve ala taxes dispute komprehensif who reflect justice ground and a moral certainty law, here after with aim performs section mandate 27 Number Of Statute 6 Years 1983 the latest changed by number Statute 28 Years 2007 about general provision and taxation Prosedures (KUP), therefore at forms a dispute Working Out Body Takes (BPSP) based Statute Number 17 Years 1997, but in its performing taxes dispute working out via BPSP stills to exist law uncertainty that can evoke in justice. Since that was required a Taxes Justice that correspondent to judgement power system at Indonesian and can create justice and a moral law in taxes dispute working out. For meeting this exspection publishes Number Republic Of Indonesian Statute 14 Years about Taxes Justices.

To the effect this thesis writing is subject to be know how taxes dispute working out base Number Statute 14 Years 2002 about Taxes Justice at Taxes Justice, evoked constraint in taxes dispute working out at Taxes and effort justice that is done to settle evoked constraint deep taxes dispute working out at Taxes Justice.

Approximate methods that is utilized in this research is empirical judicial formality. Means empirical judicial formality it be identification and conception sentence as instruction of social that nile and functional deep life system that structure. Data that is gotten from bibliography research arranged by prows analized data with *descriptive-quantitatif-analitif* so to be gotten a conclusion.

Taxes dispute working out via Taxes Justice is managed in Chapter IV Section 34 until with section 92 Number Statute 14 Years 2002 to one verdict are proposed one letter of claims or one letter appeal. Current augh Taxes Justice, beside as supplementary as BPSP also substantial constitutes completion from BPSP. Evoked constraint at deep taxes dispute working out at this Taxes Justice consisting of constraint at administrative and judicial. The revisies process to hit section in Statute Number 14 Years 2002 constitute efforts to settle evoked constraint over and above increasing Human Resources especially at direct the interasting educational deep activity at Taxes Justice. Since fast probing ground implement, modesly and demulcent cost haven't undivided performed therefore expected more Taxes Justice performance increased by perfectly discipline and dispute check tech taxes.

Key word : Solving, dispute, Taxes, Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya pasca amandemen ke empat Undang Undang Dasar (UUD) 1945, telah mempertegas eksistensi lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia, sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen. Sebelumnya independensi kekuasaan kehakiman sangat tidak mandiri¹, hal ini dikarenakan intervensi kekuasaan ekstra yudisial, khususnya dari eksekutif sangat besar. Kondisi ini terjadi karena instrumen hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia memberikan peluang adanya intervensi pihak eksekutif untuk masuk dalam kekuasaan kehakiman, dari mulai pengangkatan, pembinaan kepegawaian dan penggajian bagi para hakim yang memegang jabatan sebagai pelaksana kekuasaan hakim.

Kondisi tersebut terjadi juga tidak terlepas dari sifat *executive heavy* yang dianut UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan terhadap lembaga-lembaga Negara.² Dengan sifat tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan negara lainnya. Hal ini ditambah lagi dengan sistem ketatanegaraan kita

¹ Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan Edisi 1*, Liberti, Jogjakarta, 1993, hlm.27.

² *Ibid.*

yang menempatkan kedudukan eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala Negara.³ Sifat *executive heavy* tersebut pada akhirnya memberi peluang yang besar bagi penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif, termasuk intervensi dalam kekuasaan kehakiman.

Negara Indonesia yang menganut konsepsi negara hukum modern, membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori klasik dari *Montesquieu* yang dikenal dengan teori *trias politica*, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*).⁴ Walaupun banyak yang berpendapat Indonesia tidak menganut konsepsi pemisahan kekuasaan secara murni, melainkan hanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Namun ada juga yang berpendapat bahwa UUD 1945 menganut paham *duo politica*, karena pemisahan kekuasaan Negara dalam UUD 1945 hanya menyangkut dua kekuasaan saja, yaitu: Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagaimana diatur dalam Bab III, dan Kekuasaan Kehakiman seperti yang diatur dalam Bab IX, melalui paham atau ajaran *duo politica* ini terjadilah pemisahan kekuasaan, sehingga

³Adnan Buyung Nasution, *Menuju Lembaga Peradilan Yang Independen di Indonesia, Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional*, Jakarta, 11-12 Januari 1999, hlm.3.

⁴Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.7.

dengan demikian UUD 1945 juga menganut ajaran politik *separation of power*.⁵

Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut konsepsi *welvaarstaat* (negara kesejahteraan), mempunyai tujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan. Secara historis konsepsi negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) pada permulaan abad ke 20, membawa pergeseran pada peranan aktifitas pemerintah. Pergeseran dimaksud adalah konsepsi *nachtwakerstaat* ke konsepsi *welvaarstaat*. Pada konsepsi *nachtwakerstaat*, tugas pokok pemerintah adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah serta berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat belaka. Sementara pada konsepsi *welvarstaat*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat⁶.

Atas dasar pergeseran konsepsi *nachtwakerstaat* ke konsepsi *welvarstaat*, maka sejak saat itu lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas⁷. Hal ini menimbulkan semakin besarnya campur tangan pemerintah (penguasa) di dalam setiap sektor kehidupan masyarakat,

⁵Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Posision Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman*, ICEL & LeIP, Jakarta, 1999, hlm.ix.

⁶E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960, hlm.32.

⁷*Ibid*, hlm.33.

termasuk campur tangan dalam bidang sosial-ekonomi. Sjachran Basah⁸ mengkaitkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*), yaitu tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Untuk menjalankan tugas-tugas *public service*, oleh administrator Negara selain bertindak berdasarkan perundang-undangan juga diberi kewenangan bertindak berdasarkan *freies Ermessen (discretionair)*, yaitu kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang pengaturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan⁹. Hal ini juga sebagai konsekuensi logis dianutnya konsepsi *welvaarestaat*, dimana pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga didasarkan inisiatif sendiri melalui *Freies Ermessen*¹⁰.

Pelaksanaan *Freies Ermessen* pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara, baik dalam bentuk *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan penguasa yang melanggar hukum), *detournement de pouvoir*

⁸Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.3.

⁹Saut P. Panjaitan, *Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, dalam buku *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2002, hlm.120.

¹⁰Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2002. hlm 188.

(penyalahgunaan wewenang), maupun dalam bentuk *willekeur* (berbuat sewenang-wenang), yang mengakibatkan terampasnya hak asasi warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Saut P. Panjaitan¹¹, yang mengatakan bahwa adanya *Freies Emerssen* bukanlah tidak menimbulkan masalah, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara menjadi semakin besar.

Keleluasaan pemerintah dalam rangka mengupayakan kesejahteraan rakyat berdampak pada tindakan-tindakan pemerintah yang pada akhirnya membatasi dan membebani rakyat, contohnya regulasi dalam bidang perizinan. Dengan menerapkan kebijaksanaan yang mengharuskan adanya suatu izin dari pihak pemerintah atas suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh rakyat, seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha dan sebagainya, berarti pemerintah telah membatasi dan membebani rakyat. Karena tanpa adanya izin dari pemerintah, maka akan menimbulkan pelanggaran dari masyarakat yang melakukan suatu perbuatan, seperti mendirikan bangunan ataupun mendirikan suatu usaha¹².

Tindakan pemerintah ini merupakan implelementasi dari fungsi pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan di sini tidak lain adalah keseluruhan kegiatan aparat negara pada umumnya atau Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada khususnya, yang tidak merupakan kegiatan pembuatan peraturan (legislatif) maupun aktifitas

¹¹ *Ibid*, hlm.107.

¹² C.S.T. Kansil & Cristine S.T.Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hlm.94.

mengadili yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas¹³. Dengan demikian, urusan pemerintahan dimaksud adalah semua kegiatan aparat yang bersifat eksekutif, termasuk di dalamnya kegiatan administratif dari Kesekretariatan Jenderal lembaga legislatif (DPR) maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung).¹⁴

Salah satu tindakan pemerintah yang sering berbenturan dengan kepentingan rakyat adalah dalam lapangan perpajakan. Pemerintah sejak tahun 1983 telah melakukan reformasi perpajakan, sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983. Reformasi dalam bidang pajak kemudian mendorong pemerintah Indonesia memberlakukan sistem *self-assesment*,¹⁵ yaitu suatu sistem yang pada intinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajak sendiri pajak yang terhutang dan menyetorkannya ke kas negara. Sehingga fungsi aparatur pajak tidak lagi seperti dalam sistem perpajakan sebelumnya (*official-assesment*) yang menitikberatkan kegiatannya pada tugas merampungkan dan menetapkan semua surat pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

¹³Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1981, hlm.1. Dapat dilihat juga pada Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, LPP-HAN, Jakarta, 1999, hlm.42.

¹⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.78.

¹⁵R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Reflika, Bandung, 1998. hlm.67.

Aparatur pajak, yang dalam praktik lebih dikenal dengan istilah fiskus,¹⁶ kini berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan menerapkan sanksi administrasi perpajakan. Karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang, maka wajib pajak harus mampu memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem *self-assessment* ini, serta semakin meningkatnya jumlah pembayar pajak tentu akan mengakibatkan semakin meningkatnya potensi sengketa pajak.

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan, yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak.¹⁷ Berdasarkan ketiga sumber tersebut, ternyata dalam setiap APBN terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini ditandai dari tahun ke tahun penerimaan dana yang berasal dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai penerimaan negara yang paling potensial dalam pembiayaan pembangunan nasional, dibandingkan dari sektor-sektor lainnya, seperti dari sektor migas yang sekarang ini sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus, karena sifatnya yang tidak bisa diperbarui.

¹⁶ H. Sobari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm.24.

¹⁷ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta, Alumni, hlm.25.

Oleh karenanya sehubungan dengan keadaan tersebut, pemungutan pajak di tengah masyarakat dipandang perlu ditegakkan dengan baik, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya terhadap pajak berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus).

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparat pajak (fiskus). Oleh sebab itu untuk lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak, serta dapat memberikan putusan hukum dan kepastian hukum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Perlunya suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, "Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Karakteristik sengketa pajak, merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara). Pendapat ini didasarkan atas ruang lingkup hukum pajak yang masuk dalam lingkup hukum publik. Bahkan menurut Brotodihardjo¹⁸, hukum pajak merupakan anak bagian dari administrasi. Dengan demikian sengketa pajak identik dengan sengketa administrasi (sengketa Tata Usaha Negara).

Penyelesaian sengketa pajak pada awalnya diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut dengan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), yang keberadaannya didasarkan pada Staatblad Nomor 29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (*Regeling van het beroep in Belastingzaken*). Dalam praktiknya MPP merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa pajak yang sifatnya semu, artinya sebatas menangani keberatan wajib pajak atas nilai pajak yang dibebankan oleh fiskus. Oleh karenanya lembaga ini dianggap kurang memadai untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak secara komprehensif yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP, menjadi dasar tentang perlunya dibentuk peradilan pajak tersendiri guna

¹⁸R.Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm.10.

menyelesaikan sengketa pajak. Oleh karenanya pemerintah bersama DPR telah membentuk suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena, itu diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Untuk memenuhi harapan ini terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dikenal empat upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yaitu, keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “Keberatan” dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan¹⁹. Sedangkan upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui keberatan karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak di tingkat Lembaga Keberatan.

¹⁹<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>

Hukum acara peradilan pajak tidak hanya mengenal keberatan dan banding sebagai upaya hukum biasa, tetapi termasuk pula gugatan untuk melawan kebijakan pejabat pajak yang terkait dengan penagihan pajak, seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa. Gugatan dan banding keduanya merupakan upaya hukum biasa.²⁰

Pengadilan Pajak dalam menangani masalah gugatan kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di samping terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat diajukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.²¹

Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang bersengketa ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian yang merupakan gambaran dari wewenang terhadap penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak melalui

²⁰Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 183

²¹Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira, dalam Makalah "Prosedur Beracara Dalam Pengajuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak", Jakarta, 2002, hal.2

berbagai macam upaya hukum tersebut di atas, maka dalam rangka penulisan tesis ini penulis mencoba menelusuri, meneliti dan menganalisis lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak, dengan mengambil judul **"Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak"**.

B. Perumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis akan membatasi permasalahan, yakni masalah-masalah yang berkaitan dengan **Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak**. Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Kalau mengkaji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan pajak memiliki beberapa ciri atau karakteristik Pengadilan Pajak yang membedakannya dengan pengadilan lain. Karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadilan lain, maka dalam hal penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya, Pengadilan Pajak juga memiliki karakteristik tersendiri.

Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak?
2. Kendala apa yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami aturan-aturan hukum perpajakan di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa pajak.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis.

Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan tesis ini dapat dilihat dalam setiap bab, yang antara lain:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari lima (5) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Latar belakang permasalahan menguraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan penulis dalam mengambil judul Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak.

Perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang akan diketengahkan dalam penulisan tesis ini yakni bagaimana penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak, kendala apa yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang diharapkan penulis dari dilakukannya penulisan tesis ini.

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan tesis ini.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu pengertian pajak, sengketa pajak dan Pengadilan Pajak.

Dalam tinjauan tentang pajak dan sengketa pajak menguraikan tentang pengertian pajak dan pengertian sengketa pajak.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari tujuh (7) sub bab, yaitu pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Metode pendekatan menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu metode pendekatan *yuridis empiris*.

Spesifikasi penelitian berisi tentang spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yakni *deskriptif analitis*.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Pajak Departemen Keuangan Gedung D Lantai 5 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat. yang diperkirakan menyimpan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perumusan masalah.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data *empiris* dan data dari bahan pustaka. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi data primer dan data sekunder.

Populasi menguraikan apa saja yang menjadi populasi dalam penulisan tesis ini yakni semua bahan, data, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Sampel yang dipergunakan adalah *purposive sample*.

Pengumpulan data menguraikan tentang tentang teknik dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini yakni melalui data primer yang didukung oleh data sekunder.

Metode pengolahan dan analisis data menguraikan tentang metode dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul yakni metode *deskriptif analitis kualitatif*.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada yang terdiri 3 (tiga) sub bab, yaitu mengenai penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak, kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari dua (2) sub bab, yaitu kesimpulan atas permasalahan yang ada dan disertai dengan saran penulis. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis diambil dari hasil

penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang akan penulis kemukakan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang masukan yang dapat penulis berikan untuk menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Pajak dan Sengketa Pajak

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberikan upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain.²² Pemberian yang dilakukan rakyat pada saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau pengusaha setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

²²Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.1.

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

1. Pengertian Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu

dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Untuk mengambil pengertian yang lebih konkrit tentang pajak, dapat kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, diantaranya:

1. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum²³.

2. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum²⁴.

3. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum²⁵.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

²³ *Ibid* hlm.5.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.

- a. pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
- b. sifatnya dapat dipaksakan.
- c. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan serta berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar

pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya

Berbeda dengan pengertian pajak, hukum pajak mempunyai arti suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak²⁶. Dengan kata lain hukum pajak menerangkan:

- a. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak).
- b. Objek pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah.
- d. Timbulnya dan hapusnya utang pajak.
- e. Cara penagihan pajak.
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Hukum pajak bermanfaat untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, ada beberapa jenis pajak yang dibebani kepada masyarakat, antara lain:

1. Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

²⁶Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, hlm.1.

2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Wewenang yang dimiliki pemerintah di dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, walaupun mengandung unsur paksaan tidak berarti tanpa didasari suatu aturan hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI dalam Pasal 23 A (hasil amandemen) dengan tegas menyebutkan *“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Artinya konstitusi kita sangat melindungi rakyat dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa (fiskus) di dalam memungut pajak.

Sistem pemungutan pajak kepada masyarakat dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: ²⁷

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

²⁷Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit*, hlm.22.

Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong /

memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam *official assessment system* Fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan sistem *semi self assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

Walaupun perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berdasarkan sistem *self assessment*, namun tidak berarti Fiskus (petugas/pejabat pajak) tidak berwenang melakukan pemeriksaan dengan mengoreksi dan menghitung kembali serta selanjutnya menetapkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan kondisi ini, dimana seringkali wajib pajak merasa keberatan dengan penetapan jumlah pajak terutang dari Fiskus yang dituangkan dengan Surat Tagihan Pajak, maka akan timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

2. Pengertian Sengketa Pajak

Dalam UU KUP tidak ada ketentuan yang mengatur pengertian sengketa pajak. Sebaliknya, Pasal 25 ayat (1) UU KUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Arti keberatan dapat diajukan bila ada sengketa pajak dan Pasal 25 ayat (1) UU KUP hanya menentukan secara terbatas objek yang dapat diajukan sengketa pajak.

Pengertian sengketa pajak hanya diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 bukan dalam UU KUP. Adapun pengertian sengketa pajak adalah sebagai berikut:

“Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur dari sengketa pajak yaitu:

- a. Sengketa dalam bidang perpajakan
- b. Ada dua pihak yaitu Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak
- c. Ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak.
- d. Ada kesempatan/hak mengajukan banding atau gugatan.
- e. Banding atau gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak.
- f. Didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

B. Pengadilan Pajak

Pada tahun 2002 ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang tersebut diundangkan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27 pada tanggal 12 April 2002. Dengan demikian sejak tahun 2002 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki suatu badan peradilan khusus dalam bidang pajak dengan nama Pengadilan Pajak.

Perubahan nama badan peradilan pajak dari badan penyelesaian sengketa pajak membawa implikasi terhadap sistem peradilan Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Implikasi itu antara lain bertambahnya satu lagi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kalau

mengkaji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka terlihat adanya beberapa ciri atau karakteristik Pengadilan Pajak yang membedakannya dengan pengadilan lain, yakni menyangkut beberapa hal:

1. Kompetensi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam menyelesaikan sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan dalam 2 (dua) macam upaya hukum, yakni “Gugatan” dan “Banding”. Dalam hal “Banding” Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 ayat (2)). Sedangkan dalam hal “Gugatan” Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 31 ayat (3)).

Istilah “Gugatan” dan “Banding” dalam sistem peradilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mempunyai makna yang berbeda dengan istilah “Gugatan” dan “Banding” dalam sistem peradilan pada lembaga-lembaga peradilan yang lain seperti pada Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sistem Peradilan Pajak, “gugatan” menunjukkan bahwa sengketa tersebut belum diajukan pada upaya hukum lain. Jadi merupakan proses yang pertama kali oleh wajib pajak untuk menempuh upaya hukum lain. Jadi merupakan proses yang pertama kali oleh wajib pajak untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Pajak, sedangkan istilah Banding, wajib pajak pernah menempuh upaya hukum lain melalui Upaya Administratif berupa keberatan, yakni ke DirJend Pajak atau DirJend Bea dan Cukai atau Kepala Daerah. Kemudian apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak setuju dengan keputusan DirJend Pajak atau DirJend Bea dan Cukai atau Kepala Daerah, lalu mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak juga diberi kewenangan untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. (Pasal 32 ayat (1)). Kewenangan ini nampaknya diselaraskan dengan kewenangan-kewenangan lembaga

peradilan lain seperti dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara, dimana salah satu kewenangan pengadilan pada tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut adalah juga mengawasi kuasa hukum.

2. Objek sengketa pajak

Untuk mengetahui objek sengketa dalam sengketa pajak dapat dilihat dari pengertian sengketa pajak itu sendiri. Seperti yang diuraikan mengenai pengertian sengketa pajak maka tampak jelas yang menjadi objek sengketa pajak adalah Keputusan. Yang dimaksud dengan Keputusan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesungguhnya objek sengketa pajak adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat

yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan baik di pusat maupun di daerah.

Jenis-jenis Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berupa:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar.
- d. Surat ketetapan pajak nihil
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.
- g. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- h. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

Bentuk dan isi dari masing-masing jenis keputusan tersebut bervariasi tergantung jenis pajak dan pejabat yang membuatnya.

3. Subjek Sengketa Pajak

Subjek sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.²⁸

Kalau memperhatikan pengertian tersebut, maka subjek sengketa pajak adalah antara pemerintah atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum perdata.

4. Organisasi Pengadilan Pajak

Karakteristik dari Pengadilan Pajak adalah berkaitan dengan organisasinya. Menurut ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 susunan Pengadilan Pajak terdiri dari:

1. Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak lima orang wakil ketua. Mereka diangkat oleh Presiden dari para hakim untuk masa jabatan lima tahun dan dapat

²⁸Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm.63.

diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Pengusulan untuk menjadi pimpinan pajak dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berstatus sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

2. Hakim Anggota

Para hakim Pengadilan Pajak juga diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Para hakim anggota oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 juga diberi status sebagai pejabat negara dan unsur pelaksana tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

3. Sekretaris

Pengadilan Pajak dilengkapi dengan sebuah sekretariat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang administrasi umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Sekretaris atau wakil sekretaris atau pegawai sekretariat pengadilan pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

4. Panitera

Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil dan beberapa orang panitera pengganti yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

5. Majelis Kehormatan Hakim

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa di Pengadilan Pajak dibentuk majelis kehormatan hakim. pembentukan, susunan, tata kerja serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.

Majelis kehormatan hakim bertugas untuk meneliti dan meminta keterangan ketua, wakil ketua atau hakim yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

6. Susunan atau Tingkatan Pengadilan dan Upaya Hukum

Pengadilan Pajak hanya mengenal satu tingkatan. Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi tidak memiliki pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi sebagaimana pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Tidak adanya tingkatan lain selain Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan Pajak merupakan karakteristik Peradilan Pajak di Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Tidak adanya tingkatan Pengadilan Pajak, juga menyebabkan tidak adanya upaya hukum lain bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Satu-satunya yang ditempuh adalah upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali hanya akan memeriksa berkas perkara dan menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidak. Sedangkan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terbatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan penulisan tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK”** ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada Bab Pendahuluan.

Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan suatu langkah-langkah atau metode dalam penelitian.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode.

Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁹

Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodenya.

Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.³⁰

Dari uraian di atas metode merupakan unsur mutlak guna melakukan penelitian. Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

²⁹Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, AKMIL, Magelang, 1987, hlm.8.

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.17.

A. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.³¹

Pendekatan secara *yuridis* dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan *empiris* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan *empiris* dengan jalan terjun langsung dari objeknya.

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan *yuridis empiris* mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat *deskriptif analitis*. Deskripsi maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984, hlm.51.

Pengadilan Pajak.³² sedangkan *deskriptif*, artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat *deduktif*, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya,³³ serta *analitis* artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.³⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Pajak Departemen Keuangan Gedung D Lantai 5 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data *empiris*) dan dari bahan pustaka.³⁵ Adapun jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi:

1. Data Primer

Adapun data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden.

³²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36.

³³*Ibid*, hlm.38.

³⁴*Ibid*, hlm.39.

³⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.51.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁶ Sampel yang dipergunakan dalam penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak” adalah *purposive sample*. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Pajak yang diwakili oleh 1 (satu) orang Hakim senior.

F. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang

³⁶ *Ibid*, hlm.172.

berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, maka penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

Dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Pajak yang diwakili oleh 1 (satu) orang Hakim senior.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa

dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara *coding* atau pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokkan dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk tabel. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara *deskriptif-analitis-kualitatif*, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*),³⁷ Lexy Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.

BAB IV

PEMBAHASAN

³⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.163-165.

A. Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak

Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya akan diuraikan prosedur pemeriksaan perkara Banding dan Gugatan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut:

1. a. Memasukan Surat Permohonan Banding

Banding diajukan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya, seorang pengurus (bila berstatus badan Hukum) atau Kuasa Hukumnya, dengan surat permohonan banding berbahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu diajukannya banding 3 (tiga) Bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Jangka waktu ini sifatnya tidak mengikat,³⁸ artinya jika jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaan pemohon banding, maka jangka waktu tersebut dapat dikesampingkan.

Terhadap satu surat keputusan diajukan satu surat banding, dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan

³⁸ Kusumasto Subagjo, Wawancara, Majelis IV (empat) Hakim Pengadilan Pajak, Jakarta, 24-Maret-2008

tanggal diterimanya surat keputusan yang di banding. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang terutang³⁹. Permohonan banding sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemohon, dan tidak dapat diajukan kembali.

b. Memasukan Surat Gugatan

Gugatan diajukan oleh Penggugat, Ahli Warisnya, Seorang Pengurus (bila berstatus badan hukum) atau Kuasa Hukumnya dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu selain gugatan terhadap surat pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat.

Jangka waktu pengajuan gugatan ini pun sifatnya tidak mengikat⁴⁰, artinya jika jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaan penggugat, namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu surat keputusan diajukan satu surat gugatan. Pengajuan gugatan tidak

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan pajak ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya dan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat akan sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan. Gugatan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penggugat dan tidak dapat diajukan kembali.

2. Persiapan persidangan

Berbeda dengan mekanisme di Pengadilan pada umumnya, pada Pengadilan Pajak acara jawab menjawab antara pemohon banding atau penggugat dengan terbanding atau tergugat dilakukan sebelum penunjukan Majelis Hakim artinya hal tersebut dilakukan oleh Penitera sebelum dilakukan persidangan oleh Hakim.

Dalam hal banding Pengadilan melalui Panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah mengirimkan salinan surat

banding kepada pihak lawan (terbanding). Kemudian terbanding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyampaikan surat uraian banding. Selanjutnya surat uraian banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh Panitera harus sudah dikirimkan kepada pihak lawan (pemohon banding), dan pemohon banding dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari pemohon banding dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah dikirimkan kepada terbanding.

Dalam hal gugatan, Pengadilan melalui Panitera dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah mengirimkan salinan surat gugatan kepada pihak lawan (tergugat). Kemudian tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyampaikan surat tanggapan atas gugatan penggugat. Selanjutnya salinan surat tanggapan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari oleh Panitera harus sudah dikirimkan kepada pihak lawan (penggugat) dan penggugat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari penggugat tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah dikirimkan kepada tergugat.

3. Pemeriksaan di persidangan

Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis untuk acara biasa atau Hakim Tunggal

untuk acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan atau kejelasan berkas perkara banding atau gugatan.

Kelengkapan berkas banding atau gugatan adalah kelengkapan mengenai ada atau tidak adanya fotocopy surat keputusan yang dibanding atau digugat. Sedang yang dimaksud dengan kejelasan banding atau gugatan adalah kejelasan atas alasan-alasan banding atau gugatan. Ketidaklengkapan dan atau ketidakjelasan banding dan gugatan sepanjang bukan merupakan persyaratan formal seperti harus menggunakan Bahasa Indonesia, satu surat keputusan satu surat gugatan, dan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terutang, kelengkapannya dan atau kejelasannya dapat diajukan dipersidangan.

Untuk kelancaran persidangan, Majelis Hakim dapat memanggil pihak-pihak yang bersengketa. di Pengadilan Pajak, sifat pemanggilan terhadap pihak terbanding atau tergugat merupakan keharusan, sementara itu untuk pihak pemohon banding atau penggugat bukan merupakan keharusan. Artinya, Ketua Majelis dapat memanggil pihak pemohon banding atau penggugat hanya apabila diperlukan untuk memberikan keterangan. Namun demikian pihak pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua Majelis untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan, dan

Ketua Majelis akan memberitahukan hari dan tanggal persidangan kepada pemohon banding atau penggugat.

Kepada terbanding atau tergugat, Majelis Hakim dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Apabila majelis memandang perlu, dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dipersidangan, Ketua Majelis dapat meminta pemohon banding atau penggugat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. sebelum mengambil putusan majelis surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak.

Pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan terhadap:

- a. sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa sengketa berupa banding atau gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal banding ataupun persyaratan formal gugatan.
- b. Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan acara biasa sejak gugatan diterima.
- c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi putusan atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak.

d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dari terbanding atau tergugat dan tanpa surat bantahan dari penggugat.

4. Putusan

Putusan dalam sengketa pajak dengan acara biasa, terhadap perkara banding harus sudah dijatuhkan oleh Hakim dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak surat banding diterima, dan apabila ada hal-hal khusus dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Hal-hal yang khusus tersebut antara lain pembuktian sengketa rumit dan pemanggilan saksi memerlukan waktu yang lama. Sementara itu terhadap perkara gugatan, putusan harus sudah dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima, dan apabila ada hal-hal khusus dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Terhadap sengketa pajak tertentu yang diperiksa dengan acara cepat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diputus dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari.

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam hal diperiksa oleh Majelis, putusan diambil berdasarkan

musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Majelis. Dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan Hakim yang tidak sepakat dengan putusan yang diambil harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak (*dissenting opinion*).

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak baik dalam hal banding maupun gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1), dapat berupa :

- a. Menolak
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
- c. Menambah pajak yang harus dibayar
- d. Tidak dapat diterima
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau
- f. Membatalkan

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Contoh Kasus Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak atas perkara permohonan banding Nomor : Put.0552/PP/A/MV/16/2002 tanggal 27 September 2002 juncto

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 35/B/PK/PJK/2003 tanggal 2 Juni 2004, sebagai berikut :

PARA PIHAK

1. Pemohon Banding : PT. BINTANG KARTIKA MAKMUR

Alamat : Menara Batavia Lt.15 KH. Mas Mansyur
Kav.126 Jakarta.

NPWP : 01.397.980.2-022.000

Jenis Usaha : Jasa Kontraktor

2. Termohon Banding : DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Alamat : Jalan. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-
42 Jakarta

Objek Gugatan : SK No. KEP-203/WPJ.05/BD-0402/2001
tanggal 19 Nopember 2001 juncto SKP
KB Pajak Pertambahan Nilai No.
00124/207/95/022/00 tanggal 18
September 2000.

KASUS POSISI

Bahwa PT. Bintang Kartika Makmur (PT.BKM) adalah Kontraktor yang ditunjuk oleh A.P.Moller, yaitu suatu perusahaan pelayaran internasional yang didirikan menurut hukum Denmark dan berkedudukan

di Copenhagen Denmark. Merk dagang yang digunakan oleh A.P.Moller adalah MAERSK SEALAND, untuk menjalankan kegiatan tertentu di Indonesia dan memberikan jasa kepada A.P.Moller dalam kaitan dengan pelayaran internasional.

Adapun jenis jasa yang dilakukan oleh PT. BKM hanya meliputi jasa pengaturan, pengurusan dan pengawasan kargo serta pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan ("*handling agent*"), dan juga sebagai agen yang menerima pembayaran yang menjadi hak A.P.Moller ("*collecting agent*") dan juga bertindak sebagai "*paying agent*" untuk pembayaran kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pelayaran internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian antara A.P.Moller dengan PT. BKM mengenai jasa yang diberikan dan dilakukan oleh PT. BKM kepada A.P.Moller.

Bahwa PT. BKM tidak mensubkontrakan pekerjaannya kepada perusahaan pihak ketiga, seperti Perum Pelabuhan dan Perusahaan Depo Kontainer. Hal ini dapat dibuktikan bahwa semua tagihan dari pihak ketiga yaitu Perum Pelabuhan dan Perusahaan Depo Kontainer ditujukan kepada A.P.Moller (Maersk Sealand), dimana Maersk Sealand adalah merk dagang dari A.P.Moller.

Bahwa PT.BKM menerima penghasilan berupa fee dan komisi langsung dari A.P.Moller berupa prosentase tetap dari nilai bersih biaya angkut kargo yang berkaitan dengan kegiatan tambahan atas angkutan barang ekspor maupun impor oleh A.P.Moller.

Bahwa berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Denmark tahun 1986, antara lain diatur secara khusus bahwa penghasilan dari usaha pelayaran dalam lalu lintas internasional akan dikenakan pajak di negara asal/domisili.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 4 huruf e, disebutkan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “pemanfaatan atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean”. Dengan kata lain, jika terjadi sebaliknya yaitu apabila terdapat pemanfaatan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean di luar pabean. Maka atas pemberian jasa tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena di luar ruang lingkup Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN. Dengan demikian PT. BKM bukan pengusaha kena pajak (PKP) atas penghasilan tersebut, dan berdasarkan hal tersebut seharusnya PT. BKM dikenakan PPN yang terutang adalah Nihil sebagaimana koreksi yang telah disampaikan PT. BKM kepada tergugat.

Berdasarkan dasar dan uraian Penggugat dalam permohonan bandingnya, selanjutnya penggugat mohon agar Pengadilan Pajak membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN untuk masa pajak Januari 1995 - Desember 1995.

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

Surat banding dari Pemohon Banding telah disampaikan kepada Terbanding, dan selanjutnya Terbanding telah menyampaikan surat uraian banding ke Pengadilan Pajak. Atas surat uraian banding dari Terbanding telah pula dikirimkan kepada Pemohon Banding, dan selanjutnya Pemohon Banding telah menyerahkan surat bantahannya.

Pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pihak Terbanding dan juga Pemohon Banding di persidangan telah menyampaikan penjelasan dan didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN PAJAK

Setelah melalui pemeriksaan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya, menolak dalil-dalil dari Pemohon Banding dan membenarkan tindakan Terbanding yang telah mengeluarkan SK No.KEP-203/WPJ.05/BD-0402/2001 tanggal 19 Nopember 2001 yang telah menguatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP KB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No.00124/207/95/022/00 tanggal 18 September 2000

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil putusan yang amarnya berbunyi "Menolak Permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-203/WPJ.05/BD.0402/2001 tanggal 19 Nopember 2001 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa pajak Januari

s/d Desember 1995 Nomor 00124/207/95/022/00 tanggal 18 Desember 2000, atas nama PT.Bintang Kartika Makmur, NPWP 01.397.980-022.000. dengan alamat Menara Batavia Lt.15, Jl KH.Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta.

PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alasan yang digunakan oleh Pemohon Banding/Pemohon PK adalah bahwa Pengadilan Pajak dalam putusannya telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Setelah melakukan pemeriksaan berkas perkara, selanjutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa secara formal PK dapat diterima, karena permohonan PK diajukan melalui Pengadilan Pajak masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 2002.
2. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon PK dalam memori/risalah PK dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung, putusan *judex factie* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PK bukan Perusahaan Kena Pajak (PKP), karena berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Satu, tanggal 16 Oktober 1989 No.S-466.KPJ.03/KI.1606/1989 tentang Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pengukuhan KEP-3043 PKP/WPJ.03/KI.1612/1989 atas nama Pemohon PK, telah dinyatakan dicabut dan Pemohon PK baru memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) lagi pada tanggal 27 Januari 2000, yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan. Sehingga dalam masa 16 Oktober 1989 sampai tanggal 27 Januari 2000 Pemohon PK tidak memiliki salah satu syarat untuk melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
- Bahwa objek pajak bukan merupakan jasa yang dapat dikenakan pajak, karena Pemohon PK adalah sub-kontraktor dari A.P.Moller suatu perusahaan internasional yang berkedudukan di Denmark dengan merk dagang Maersk Sealand yang secara langsung tidak dapat beroperasi di Indonesia.
- Bahwa disamping itu pajak yang dapat dikenakan terhadap yang mengandung unsur asing baik objeknya maupun subjeknya, *in casu* objek pajak yang berada di dalam negeri milik objek pajak asing, berada dalam lingkup Hukum Pajak Internasional. Dan menghindarkan Pajak Ganda Internasional antara lain dilakukan

antara Indonesia dengan Kerajaan Denmark dengan telah ditandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang oleh Pasal 8 dari Persetujuan *a quo* ditentukan bahwa “penghasilan dari usaha pelayaran dalam lalu lintas internasional dikenakan pajak dinegara asal domisili”, sehingga penghasilan A.P.Moller yang diterima melalui Pemohon PK, hanya dikenakan pajak di Denmark. Karena itu uang jasa yang ditandatangani Pemohon PK untuk kepentingan A.P.Moller bukan merupakan objek pajak di Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Pemohon PK bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas jasa yang diserahkan kepada A.P.Moller di Denmark. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan PT. BKM dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 September 2002 No.PUT.0552/PP/A/MV/16/2002, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan, sebagai berikut

- A. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 Nopember 2001 No.KEP-203/WPJ.05/BD-0402/2001 juncto SKP KB PPN No.00124/207/95/022/00 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan Kantor Pelayan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang dengan pajak terhutang menjadi NIHIL.
- B. Menghukum Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengembalikan pembayaran pajak yang telah dibayar lunas sesuai dengan SKP KB

No.00124/207/95/022/00 tanggal 18 September 2000 sejumlah Rp.3.108.254.856,00 ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya untuk paling lambat 24 (duapuluh empat) bulan berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

C. Menetapkan status PT. BINTANG KARTIKA MAKMUR (Pemohon Banding/Pemohon PK) adalah bukan Pengusaha Kena Pajak karena pengukuhan PKP yang dilakukan oleh Kepala KPP Jakarta Tanah Abang dilakukan secara jabatan.

D. Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

Analisis

Untuk menggali lebih jauh uraian pada bagian sebelumnya, dan untuk menjawab pertanyaan tentang Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak perlu dijabarkan terlebih dahulu pada bagian ini secara komprehensif tentang efektifitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan eksistensi dari Pengadilan Pajak itu sendiri, yaitu :

1. Penerapan sistem pemeriksaan vertikal (berjenjang), sebagai implementasi kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung.
2. Penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang secara imperatif terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Penerapan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara, karena secara kategoris Hukum Pajak masuk kedalam lingkup Hukum Administrasi Negara
4. Dikandungnya prinsip keadilan dan kepastian hukum

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dibuktikan adanya unsur penerapan Hukum Publik terhadap persoalan atau sengketa yang diajukan. Karena sengketa pajak merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Pajak, dan secara kategoris Hukum Pajak masuk dalam lingkup Hukum Publik, dalam hal ini Hukum Administrasi Negara. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Aparatur Peradilan (para Hakim) yang oleh Undang-Undang diberi wewenang menyelesaikan sengketa pajak. sehingga memenuhi unsur adanya aparatur peradilan yang berwenang memutus perselisihan. Dalam hal pemeriksaan sengketa di Pengadilan Pajak karena karakteristik sengketa pajak merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Administrasi Negara maka dalam pemeriksaan atas sengketa pajak berlaku dan diterapkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara.

Pengadilan Pajak menerapkan pemeriksaan ulang vertikal (berjenjang). Karena pemeriksaan di Pengadilan Pajak, pemeriksaan selanjutnya hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal ini

dikarenakan sifat dari putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.⁴¹ sementara itu dalam Pasal 77 ayat (3) nya disebutkan hanya ada upaya hukum ke Mahkamah Agung.⁴²

Ketentuan hanya diberlakukannya pemeriksaan (upaya hukum PK) ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak bertujuan untuk mempersingkat pemeriksaan ulang vertikal. Memperbanyak pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi pajak yang memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan Negara, sehingga apabila terjadi sengketa pajak diperlukan penyelesaiannya dengan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas.

Alasan mendasar lainnya adalah melalui mekanisme PK, Mahkamah Agung berwenang melakukan pemeriksaan sengketa pajak baik secara *judex juris* maupun *judex factie*. Artinya pada PK Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan atau pengujian. Hal ini tidak mungkin tercapai melalui pemeriksaan kasasi karena dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung hanya berwenang menguji sengketa pajak secara *judex juris*.

⁴¹ Putusan Pengadilan Pajak “merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

⁴² “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan BPSP, khususnya penerapan sistem Kekuasaan Kehakiman dengan pemeriksaan ulang berjenjang ke Mahkamah Agung, maka dalam Pengadilan Pajak diberlakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Menurut Penulis, berdasarkan hasil penelitian dan mencermati alasan-alasan PK dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 91, sebenarnya ada perbedaan dengan alasan-alasan PK yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Alasan-alasan sebagai syarat permohonan PK menurut Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkaranya diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sementara itu dalam Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan alasan-alasan permohonan PK, yaitu :

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adanya alasan pada huruf e diatas merupakan alasan yang membedakan antara Pengadilan Pajak dengan pengadilan lainnya dalam hal pengajuan permohonan PK. Alasan PK dalam Pasal 91 huruf e menurut penulis merupakan alasan yang sebenarnya secara tidak langsung telah memberikan hak kepada semua Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Pajak untuk dapat menempuh upaya hukum. Karena alasan tersebut, yang dapat diinterpretasikan bahwa putusan pengadilan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya, merupakan alasan yang sangat fleksibel untuk dapat dijadikan dasar bahwa putusan tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini melalui putusan PK oleh Mahkamah Agung.

Atas dasar hal ini, upaya hukum PK ke Mahkamah Agung adalah dapat dikatakan sebagai wujud diterapkannya sistem pemeriksaan ulang vertikal. Seperti pada contoh kasus diatas yang dijadikan dasar dan alasan PK adalah ketentuan dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak. dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa faktanya Majelis Hakim PK pada Mahkamah Agung sebelum memberikan putusannya terlebih dahulu telah melakukan pengujian.

Tujuan lain disamping tujuan yang telah disebutkan di atas, adanya upaya hukum hanya PK ke Mahkamah Agung, juga dimaksudkan agar

adanya pemeriksaan sengketa pajak yang mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan disini diwujudkan dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan final yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap putusan tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Artinya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak seminimal mungkin, termasuk pembatasan upaya hukum didalamnya.

Namun apabila ditelusuri ketentuan tentang syarat pengajuan banding, proses persiapan persidangan dan pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Pajak, maka akan menjadi kontradiksi dengan penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kontradiksi ini dilihat dari kesimpulan bahwa maksimal waktu yang dibutuhkan dari mulai masuknya permohonan perkara banding adalah 18 (delapanbelas) bulan. Hal ini dihitung dari waktu maksimal pengajuan banding selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan yang dimohonkan banding, ditambah 15 (limabelas) bulan waktu maksimal yang diberikan kepada hakim untu menjatuhkan putusan. Waktu 18 (delapan belas) bulan ini hanya pada pemeriksaan di Pengadilan Pajak.

Apabila dilanjutkan dengan pemeriksaan PK ke Mahkamah Agung dapat dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Seperti halnya dari contoh kasus pemeriksaan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak

diatas, dari tanggal putusan Pengadilan Pajak, yaitu tanggal 27 September 2002, sampai putusan PK Mahkamah Agung tanggal 2 juni 2004, memakan waktu hampir 2 (dua) tahun. Sudah barang tentu jangka waktu tersebut sangat lama dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Pengadilan Pajak, dimana Peradilan Pajak bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan cepat dan mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Indikator tidak konsistennya Pengadilan Pajak menerapkan asas tersebut, khususnya asas biaya ringan juga dapat dilihat dari persyaratan keharusan membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak terutang dalam hal permohonan banding. Seperti pada contoh kasus diatas, dimana PT. Bintang Kartika Makmur (BKM) selaku pemohon banding pada saat memasukan permohonan bandingnya telah terlebih dahulu membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah tagihan pajaknya sebesar Rp.3.108.254.856,00 (tigamilyar seratus delapan juta duaratus limapuluh empat ribu delapanratus limapuluh enam rupiah) dan pada saat permohonan PK ke Mahkamah Agung jumlah pajak terutang tersebut sudah dilunasi, hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Pajak adalah sebagai putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tentang keharusan membayar 50% (limapuluh persen) dan harus dilunasi apabila permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Pajak tersebut, disamping tidak mencerminkan penerapan

asas biaya ringan, juga oleh banyak kalangan ketentuan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat wajib pajak.⁴³

B. KENDALA YANG TIMBUL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK

Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang administratif

Adanya keharusan membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Persyaratan keharusan membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak, sebelum mengajukan permohonan banding, telah melanggar asas praduga tak bersalah. Tujuan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada hakikatnya karena menolak penetapan pajak dari fiskus dan menolak keputusan keberatan yang diajukan DirJend Pajak. Oleh Wajib Pajak, DirJend Pajak dianggap telah bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan dan menentukan jumlah pajak terutang, oleh karenanya Wajib Pajak memohon agar pengadilan mengeluarkan putusan agar membatalkan keputusan dari DirJend Pajak dimaksud.

⁴³ <http://www.klikpajak.com> tanggal 29 Maret 2008

Namun dengan adanya ketentuan keharusan membayar terlebih dahulu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari kewajiban Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak dianggap telah bersalah. Secara *a contrarium* DirJend Pajak dianggap telah benar dan tidak melanggar ketentuan hukum dalam mengambil keputusan menentukan jumlah pajak terutang. Ketentuan ini pun telah melanggar asas keadilan dan HAM karena hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan melalui institusi Pengadilan Pajak telah di kebiri dengan adanya kewajiban melaksanakan terlebih dahulu keputusan tersebut, walaupun hanya sebagian. Pada hal keputusan tersebut belum atau akan diuji kebenarannya oleh hakim di pengadilan, artinya ada kemungkinan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum dan harus dibatalkan.

2. Bidang yudisial

Yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan “bahwa pemohon banding atau penggugat **dapat** memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persiapan untuk memberikan keterangan lisan”. Kata-kata “dapat” mengandung arti bahwa tidak ada kewajiban hakim untuk menghadirkannya dipersidangan. dengan demikian pemohon banding atau penggugat tidak mutlak mempunyai hak untuk hadir dipersidangan, karena dengan kata-kata dapat tersebut keputusan untuk bisa hadir atau tidak pemohon banding atau

penggugat dipersidangan ditentukan oleh Hakim, berdasarkan perlu atau tidaknya pemohon banding atau penggugat dimintakan keterangannya dipersidangan.

Hal ini berarti telah melanggar hak Wajib Pajak selaku pemohon banding atau penggugat untuk membela kepentingannya semaksimal mungkin dengan menyampaikan pendapatnya secara lisan dipersidangan.

Kendala dibidang yudisial lainnya adalah tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa, dan hanya ada upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung. Hal ini dianggap telah melanggar hak untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan pemeriksaan ulang vertikal kepada institusi pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem yang secara umum berlaku.

Adanya upaya hukum PK ke Mahkamah Agung memang diakui sebagai suatu peningkatan dibandingkan dengan saat badan peradilan pajak bernama BPSP, yang sama sekali tidak memberi peluang untuk menempuh upaya hukum. Namun hal ini tidak berarti sepenuhnya dapat diterima oleh Wajib Pajak sebagai pihak pencari keadilan. Karena ketentuan PK di samping dibatasi oleh persyaratan-persyaratan (Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak) juga permohonan PK oleh Wajib Pajak sebagai pemohon banding atau

penggugat baru dapat dilakukan setelah seluruh hutang pajaknya dilunasi. Karena prinsip bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta asas bahwa permohonan PK tidak menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan, mengharuskan Wajib Pajak membayar lunas seluruh utang pajaknya sebelum mengajukan PK. Hal ini sudah barang tentu sangat memberatkan bagi Wajib Pajak dan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa keharusan membayar lunas utang pajak sebelum pengajuan PK telah melanggar asas keadilan.

Walaupun ada ketentuan yang mengatur untuk memberikan kompensasi imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan, apabila ternyata putusan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon banding (Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak), namun ketentuan adanya pemberian kompensasi ini masih tidak seimbang dengan beban pemohon banding yang harus membayar pajaknya sementara perkara masih berjalan.

C. UPAYA UNTUK MENGATASI KENDALA YANG TIMBUL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK

Apabila ditinjau dari latar belakang lahirnya Pengadilan Pajak maka untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak yaitu

1. pada saat ini sedang diproses usulan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terutama tentang Pasal yang mewajibkan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terhutang. Terkait dengan hal tersebut dengan adanya usulan revisi mengenai penghapusan kewajiban pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terhutang akan dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan fungsi Pengadilan Pajak sebagai institusi yang berwenang dalam mengurus masalah sengketa pajak dapat menjadi lebih efektif.
2. Dilakukannya usulan untuk revisi terhadap Pasal yang mengatur tentang kehadiran pihak terbanding dan tergugat, pemeriksaan di persidangan serta Pasal mengenai pengaturan pemberian bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas kelebihan pembayaran pajak apabila permohonan banding Wajib Pajak dikabulkan. Sehingga pasal mengenai kedua hal tersebut cukup diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan bukan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.
3. Selain usaha untuk mengatasi kendala yang timbul di atas para pihak Pengadilan Pajak pada saat ini melakukan peningkatan pendidikan baik terhadap para Hakim maupun pihak administrasi di Pengadilan Pajak hal ini bertujuan agar semua pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dapat lebih memahami

aturan-aturan yang telah ada dan dapat memiliki persamaan persepsi dalam menginterpretasikan aturan yang telah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan BPSP, khususnya penerapan sistem Kekuasaan Kehakiman dengan pemeriksaan ulang berjenjang ke Mahkamah Agung, maka dalam Pengadilan Pajak diberlakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak menerapkan pemeriksaan ulang vertikal (berjenjang). Karena

pemeriksaan di Pengadilan Pajak, pemeriksaan selanjutnya hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan sifat dari putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. adanya upaya hukum hanya PK ke Mahkamah Agung, juga dimaksudkan agar adanya pemeriksaan sengketa pajak yang mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan disini diwujudkan dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan final yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap putusan tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Artinya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak seminimal mungkin, termasuk pembatasan upaya hukum didalamnya. Namun apabila ditelusuri ketentuan tentang syarat pengajuan banding, proses persiapan persidangan dan pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Pajak, maka akan menjadi kontradiksi dengan penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 50% (lima

puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat memberatkan si wajib pajak. Hal tersebut dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Mengenai kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon banding merupakan kendala di bidang yudisial. Dengan tidak hadirnya penggugat atau pemohon banding di persidangan menjadikan penggugat atau pemohon banding tidak bisa membela diri mereka secara maksimal, sehingga lahirnya suatu putusan dari Pengadilan Pajak terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penggugat atau pemohon banding.

3. Proses usulan revisi mengenai Pasal pengaturan pembayaran 50% (lima puluh persen) pajak terutang oleh si Wajib Pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di samping peningkatan Sumber Daya Manusia terutama di bidang pendidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan di Pengadilan Pajak.

B. SARAN

1. oleh karena penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana maka diharapkan ke depan kinerja Pengadilan Pajak lebih ditingkatkan dengan menyempurnakan, tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa pajak.

2. Mengenai revisi pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban membayar 50% (limapuluh persen) agar dapat dilaksanakan secepatnya dengan mengakomodir penerapan asas keadilan, asas kepastian hukum dan perlindungan HAM serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga keadilan di bidang perpajakan akan dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sesuai kebutuhannya. Tentang kehadiran pemohon banding dan penggugat sebaiknya dijadikan sebagai suatu tugas yang merupakan hal wajib bagi para hakim agar para pencari keadilan di bidang perpajakan dapat membela diri mereka secara langsung.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan yang ada di Pengadilan Pajak sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga para SDM yang terkait dengan Pengadilan Pajak dapat menyadari posisi dan perannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, **“Menuju Lembaga Peradilan Yang Independen di Indonesia: (Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional)”**, Jakarta. 11-12 Januari 1999.
- Bambang Sunggono, **“Metodologi Penelitian Hukum”**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998..
- Bambang Waluyo, **“Penelitian Hukum Dalam Praktek”**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- C.S.T. Kansil & Cristine S.T.Kansil, **“Modul Hukum Administrasi Negara”**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
- E.Utrecht, **“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”**, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1960.
- Galang Asmara, **“Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia”**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Indroharto, **“Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), **“Posision Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman”**, ICEL & LeIP, Jakarta, 1999.

Kuntjoro Purbopranoto, **“Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia”**, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1981.

Lexy Moleong, **“Metode Penelitian Kualitatif”**, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Moh.Mahfud MD, **“Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Edisi 1**, Liberti, Jogjakarta, 1993.

Muhammad Djafar Saidi, **“Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ridwan H.R., **“Hukum Administrasi Negara”**, UII Press, Jogjakarta, 2002.

R. Santoso Brotodihardjo, **“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”**, Reflika, Bandung, 1998.

Saut P. Panjaitan, **“Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara, dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara”**, UII Press, Jogjakarta, 2002.

Sjachran Basah, **“Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia”**, Alumni, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, **“Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat”**, Rajawali, Jakarta, 1985.

-----, **“Pengantar Penelitian Hukum”**, UI Perss, Jakarta, 1986.

Sobari, H, **“Pengantar Hukum Pajak”**, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

Sumyar, **“Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan”**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.

Sutrisno Hadi, **“Metode Riset Nasional”**, AKMIL, Magelang, 1987.

Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira, dalam Makalah **“Prosedur Beracara Dalam Pengajuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak”**, Jakarta, 2002.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **“Hukum Pajak Edisi 3”**, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Winarno Surachmad, **“Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik”**, Tarsito, Bandung, hal 147

Undang-undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termasuk perubahannya yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pajak.

Yurisprudensi dan bahan hukum masa penjajahan Belanda yang masih berlaku, seperti Staatsblad Nomor 29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (*Regeling van het Beroep in Belastingzaken*) dan lainnya.

<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>, online 20 Februari 2008.

<http://www.klikpajak.com>, online 29 Maret 2008

